

**KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU
JASA (PENINGKATAN KEMAMPUAN VENDOR)
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis maupun operasional perbankan, BNI membutuhkan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan. Kebutuhan tersebut mendorong BNI untuk menjalankan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan regulasi dan kebijakan internal terkait pengadaan yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan Internal terkait pengadaan dibakukan dalam Pedoman Perusahaan Pengadaan yang wajib dipedomani bagi seluruh pegawai di BNI.

Dengan berpedoman pada regulasi dan kebijakan internal terkait pengadaan barang dan/atau jasa, BNI memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang dan/atau jasa ("proses pengadaan") dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas yang tinggi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga serah terima hasil pekerjaan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh, baik bagi BNI maupun para pemangku kepentingan.

Sebagai wujud nyata komitmen BNI terhadap lingkungan, sosial, keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, proses pengadaan BNI tidak semata-mata mengedepankan faktor ekonomis.

Dalam pelaksanaan pengadaan, BNI memastikan kepatuhan penyedia terhadap komitmen Dampak Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pengadaan yang bertanggung jawab, meningkatkan transparansi, dan mengurangi dampak lingkungan.

**GOODS AND/OR SERVICES PROCUREMENT
POLICY (IMPROVED VENDOR CAPABILITIES)
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

To support the smooth running of business activities and banking operations, BNI requires goods and/or services as needed. This need encourages BNI to procure goods and/or services based on regulations and internal policies related to procurement established by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Corporate Activities and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Internal procurement-related policies are standardized in the Procurement Company Guidelines, which all BNI employees must follow.

Guided by the regulations and internal policies related to the procurement of goods and/or services, BNI ensures that every procurement process of goods and/or services ("procurement process") is carried out transparently and prioritizes high accountability principles at all stages from planning needs, selecting providers, to handing over work results, to ensure that every step is carried out efficiently, effectively, and by good governance principles. This aims to maximize the benefits obtained for BNI and its stakeholders.

As a tangible manifestation of BNI's commitment to the environment and society, favoring domestic production and empowering Micro and Small Enterprises, BNI's procurement process does not solely prioritize economic factors.

In the course of procurement, BNI ensures supplier with Environmental, Social and Corporate Governance Impact commitments. This aims to promote responsible procurement, increase transparency and reduce environmental impacts.

Terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan/atau jasa, BNI mendukung hal tersebut dengan mensyaratkan penyedia memiliki sertifikat TKDN sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, BNI juga memperdayakan penyedia UMKM dalam memenuhi kebutuhan barang/dan atau jasa.

Untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BNI secara rutin melakukan audit pengadaan barang dan/atau jasa untuk memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam rangka penerapan proses pengadaan yang baik, BNI telah menerapkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP/Anti-Bribery) dan sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. Implementasi ini menunjukkan bahwa BNI bersungguh-sungguh dalam menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, suap dan WBS serta standar manajemen mutu sesuai dengan praktik di dunia Internasional yang telah ditetapkan oleh ISO.

A. Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa di BNI didasarkan pada prinsip-prinsip yang dirancang untuk memastikan setiap tahapan prosesnya berlangsung secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip dasar dalam proses pengadaan bertujuan agar BNI dapat memperoleh hasil yang terbaik dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, memenuhi kebutuhan secara efektif, serta menjamin adanya persaingan yang sehat dan adil. Dengan menerapkan standar etika yang ketat, BNI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang dapat dipercaya, terbuka, dan akuntabel, sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan

Regarding the increased use of Domestic Products in procuring goods and/or services, BNI supports this by requiring providers to have TKDN certificates by applicable regulations. In addition, BNI empowers MSME providers to meet the needs of goods and/or services.

To ensure that the procurement process follows applicable regulations, BNI routinely conducts procurement audits to ensure that the process has been carried out according to applicable provisions and procedures.

To implement a good procurement process, BNI has implemented ISO 37001:2016 certification on the Anti-Bribery Management System (SMAP/Anti-Bribery) and ISO 9001:2015 certification on the Quality Management System. This implementation shows that BNI is serious about implementing gratification, bribery, WBS control systems, and quality management standards by international practices set by ISO.

A. Basic Principle of Procurement of Goods and/or Services

The procurement of goods and/or services in BNI is based on principles designed to ensure that each stage of the process take place in a professional, transparent and responsible manner. The application of basic principle in the procurement process aims to enable BNI to obtain the best results by optimizing available resources, meeting needs effectively and ensuring fair and healthy competition. By applying strict ethical standards, BNI is committed to creating a trustworthy, open and accountable procurement environment, so as to avoid potential abuse and provide maximum benefits for all parties involved.

memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan/atau jasa di BNI dijabarkan sebagai berikut:

1. Efisien

Pengadaan harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah, dengan pengecualian untuk pengadaan strategis yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan penghitungan semua biaya (total cost of ownership).

2. Efektif

Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Kompetitif

Pengadaan harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan, dilakukan melalui persaingan sehat di antara penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4. Transparan

Semua informasi mengenai pengadaan, termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyedia, harus terbuka bagi peserta penyedia yang berminat.

5. Adil dan Wajar

Dalam pelaksanaan pengadaan, BNI memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat

6. Terbuka

Pengadaan dapat diikuti oleh semua calon penyedia yang memenuhi syarat.

The basic principles of procurement of goods and/or services in BNI are described as follows:

1. Efficient

Procurement should strive to get the optimal and best results quickly by using the maximum possible funds and not just based on the lowest price. Strategic procurement that has significant value can be done using a total cost of ownership approach.

2. Effective

Procurement must be based on the needs that have been determined and must provide the maximum benefit by the objectives set.

3. Competitive

Procurement must be open to providers who meet the requirements, conducted through fair competition among equal providers, and meet specific requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures.

4. Transparent

All information regarding the procurement, including administrative, and technical requirements, evaluation procedures, evaluation results, and determination of prospective providers, must be open to interested provider participants.

5. Fair and Reasonable

Fair In implementing procurement, BNI gives equal treatment to all prospective Providers who meet the requirements.

6. Open

Procurement can be followed by all qualified prospective providers.

7. Akuntabel

Pengadaan harus mencapai sasaran dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan potensi penyalahgunaan atau penyimpangan.

B. Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

BNI secara tegas menetapkan etika pengadaan yang berlaku untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan. Etika pengadaan bertujuan untuk mendorong praktik pengadaan barang dan/atau jasa yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, menekan kebocoran anggaran, serta terwujudnya proses pengadaan yang bersih.

Etika pengadaan barang dan/atau jasa di BNI dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan.
2. Bekerja secara profesional mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan.
3. Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan persaingan usaha tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan dengan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan.
7. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

7. Accountable

Procurement must achieve accountable targets, thus avoiding the potential for abuse or deviation.

B. Ethics of Procurement of Goods and/or Services

BNI expressly establishes procurement ethics that apply to all parties involved in procurement. Procurement ethics aims to encourage good procurement practices, increase the efficiency of budget use, reduce budget leakage, and realize a clean procurement process

The ethics of procurement of goods and/or services in BNI are described as follows:

1. Carry out tasks in an orderly manner with a sense of responsibility to achieve targets and ensure the smoothness and accuracy of procurement goals.
2. Work professionally and independently, and maintain the confidentiality of information that, by its nature, should be kept confidential to prevent procurement irregularities.
3. They should not influence each other directly or indirectly about unfair business competition.
4. Accept and be responsible for all decisions made by the written agreement of the parties concerned.
5. Avoid and prevent conflicts of interest with related parties, directly or indirectly, resulting in unfair business competition.
6. Avoid and prevent waste and leakage of state/company finances.

8. Tidak menerima, menawarkan, dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau bentuk lain dari kompensasi dari dan atau kepada siapa pun atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan.

C. Metode dan Mekanisme Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa, BNI menerapkan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap proyek. Proses pengadaan di BNI dilaksanakan melalui beberapa metode, seperti Tender, Tender Terbatas, Penunjukan Langsung, serta Pengadaan Langsung dan Swakelola. Setiap metode pengadaan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar sesuai dengan tujuan dan prinsip pengadaan yang efisien dan efektif.

Adapun mekanisme untuk masing-masing metode pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:

7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion.
8. Not accepting, offering, and/or promising to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates, or other forms of compensation from or to anyone reasonably suspected of being related to procurement

C. Methods and Mechanisms of Procurement of Goods and/or Services

In an effort to achieve efficiency and effectiveness in the procurement of goods and/or services, BNI applies various methods in accordance with the characteristics and needs of each project. The procurement process in BNI is carried out through several methods, such as tender, limited tender, direct appointment, treatment, and self-management. Each procurement method has specific criteria that must be met in order to comply with the objectives and principles of efficient and effective procurement.

The mechanism for each of these procurement methods is as follows:

Metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa / <i>Methods of Procurement of Goods and/or Services</i>	Mekanisme Pelaksanaan / <i>Implementation Mechanism</i>
Tender	Pengadaan barang dan/atau jasa yang diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan
Tender	<i>Procurement of goods and/or services widely announced through mass media to allow qualified providers of goods and/or services to participate in the tender.</i>
Tender Terbatas	Pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya dua penawaran.

<i>Limited Tender</i>	<i>Procurement of goods and/or services offered to several parties limited to at least two bids.</i>
Penunjukan Langsung	Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan/atau Jasa atau penunjukan melalui beauty contest dengan memperhatikan syarat-syarat Penunjukan Langsung.
<i>Direct Appointment</i>	<i>Procurement of goods and/or services carried out directly by appointing one Provider of Goods and/or Services or appointment through a beauty contest by taking into account the requirements of Direct Appointment.</i>
Pengadaan Langsung	Pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk e-purchasing.
<i>Direct Procurement</i>	<i>the purchase of goods found in the market; thus, the value is based on market prices, including e-purchasing.</i>
Swakelola	Pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dan/atau diawasi oleh BNI.
<i>Self-management</i>	<i>Implementation of work done and/or supervised by BNI</i>

Gambaran Umum Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa /	Overview of Goods and/or Services Procurement Procedures
---	--

Ketentuan	Pengadaan barang dan/atau jasa mengacu kepada ketentuan eksternal dan internal (Pedoman Perusahaan Pengadaan).
Provisions	<i>Procurement of goods and/or services refers to external and internal provisions (Procurement Company Guidelines).</i>
Sentralisasi Pengadaan	Pada prinsipnya pengadaan barang dan/atau jasa menganut Sistem Sentralisasi pengadaan dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan keamanan. Namun pada beberapa hal dapat dilakukan Desentralisasi pengadaan dengan pertimbangan optimalisasi fungsi dan kewenangan yang berada di segenap unit serta memberi kesempatan rekanan lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
Centralized Procurement	<i>In principle, the procurement of goods and/or services adheres to the Centralized Procurement System with considerations of efficiency, effectiveness, and security. However, in some cases, procurement decentralization can be carried out by optimizing the functions and</i>

	<i>authorities that reside in all units and providing opportunities for local partners to participate in the procurement of goods and/or services.</i>
Strategi Pengadaan Procurement Strategy	1. Peningkatan mutu pengelolaan; 2. Penerapan pengadaan dengan sistem open contract dan kontrak payung untuk mendapatkan harga terbaik; 3. Pengelompokan fungsi pengadaan berdasarkan pekerjaan/jenis barang; 4. Perbaikan ketentuan vendor management terkait akuisisi vendor berdasarkan kelas atau tiering-nya; 5. Digitalisasi proses pengadaan. 1. <i>Improved quality of management;</i> 2. <i>Implementation of open contract and umbrella contract procurement to get the best price;</i> 3. <i>Grouping of procurement functions based on work/type of goods;</i> 4. <i>Improvement of vendor management provisions related to vendor acquisition based on class or tiering;</i> 5. <i>Digitization of the procurement process.</i>
Pemisahan Fungsi Separation of Functions	Pemisahan fungsi antara unit yang memproses pengadaan dengan: 1. Unit Pengguna; 2. Unit Pengadaan yang melaksanakan proses pengadaan; 3. Unit Vendor Management yang melakukan seleksi terhadap calon rekanan dan merekomendasikan daftar peserta pengadaan; 4. Unit yang menganalisa dan menyusun kewajaran harga (Harga Perkiraan Sendiri); 5. Unit yang membuat kontrak; 6. Unit yang melakukan review kelengkapan persyaratan dokumen pembayaran; 7. Unit yang melakukan pengawasan dan pengendalian proyek sesuai dokumen kontrak sampai dengan serah terima proyek. <i>Separation of functions between units that process procurement and;</i> 1. <i>User Unit;</i> 2. <i>The Procurement Unit that carries out the procurement process;</i> 3. <i>Vendor Management Unit that selects potential partners and recommends a list of procurement participants;</i> 4. <i>The unit that analyzes and compiles price reasonableness (Own Estimate Price);</i> 5. <i>Contracting unit;</i> 6. <i>The unit that reviews the completeness of payment document requirements;</i> 7. <i>The unit that supervises and controls the project according to the contract documents until the project handover.</i>

Leveling Kewenangan Memutus	Kewenangan memutus pengadaan dibuat berjenjang dengan pertimbangan tingkat risiko maupun Tingkat nilai pengadaan dengan metode pengambilan keputusan melalui mekanisme Komite Pengadaan.
Leveling of Decision Authority	<i>The authority to decide on procurement is tiered, considering the level of risk and the level of value of the procurement, with the method of decision making through the mechanism of the Procurement Committee</i>

D. Pengadaan melalui Sistem Electronic Procurement (E-Proc)

Proses pengadaan di BNI dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Dengan menerapkan kebijakan ini, semua pihak yang terlibat, termasuk vendor/calon rekanan, rekanan/calon peserta pengadaan dan panitia pengadaan dapat terhubung secara online dalam satu platform end-to-end mulai dari proses pendaftaran rekanan, tahap pengadaan, compliance test, penandatanganan kontrak, hingga pembayaran.

Sistem Electronic Procurement (e-Proc) yang dapat diakses pada laman Corporate Website BNI dan web: <https://e-proc.bni.co.id>. Rancangan sistem dan kebijakan e-Proc BNI bertujuan untuk mendukung strategi transformasi menjadi digital banking agar mampu menghadapi persaingan bisnis di industri perbankan yang semakin ketat dan semakin mengarah ke digitalisasi. Sistem e-Proc BNI menawarkan digitalisasi dalam proses pengadaan melalui modul-modul seperti Procurement Management, Vendor Management, dan Contract Management.

Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik melalui e-Proc BNI diharapkan dapat mendukung kualitas penerapan pengelolaan proses pengadaan barang dan/atau jasa dalam kebutuhan perbankan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung proses

D. Procurement through Electronic Procurement System (E-Proc)

The procurement process in BNI is conducted electronically based on the web/internet by utilizing communication and information technology facilities. By implementing this policy, all parties involved, including vendors / prospective partners, partners / prospective procurement participants, and procurement committees, can be connected online in one end-to-end platform starting from the partner registration process, procurement stage, compliance test, contract signing, to payment.

The Electronic Procurement (e-Proc) system can be accessed on BNI's Corporate Website and web: <https://e-proc.BNI.co.id>. The design of BNI's e-Proc system and policy aims to support the transformation strategy into digital banking in order to face business competition in the banking industry, which is getting tighter and increasingly leading to digitalization. BNI's e-Proc system offers digitization in the procurement process through modules such as Procurement Management, Vendor Management, and Contract Management.

The policy of electronic procurement of goods and/or services through e-Proc BNI is expected to support the quality of the implementation of the management of the procurement process of goods and/or services in transparent and accountable banking needs, improve the efficiency of the procurement process, support

monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dan informasi yang setara untuk semua Rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan.

Sejak tahun 2018, e-Procurement telah diterapkan di Kantor Pusat, dan bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengadaan di Kantor Pusat agar dapat termonitor secara efektif.

E. Alur Proses Pengadaan melalui Aplikasi Electronic Procurement (E-Proc)

Proses pengadaan di BNI dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Dengan menerapkan kebijakan ini, semua pihak yang terlibat, termasuk vendor/calon rekanan, rekanan/calon peserta pengadaan dan panitia pengadaan dapat terhubung secara online dalam satu platform end-to-end mulai dari proses pendaftaran rekanan, tahap pengadaan, compliance test, penandatanganan kontrak, hingga pembayaran.

Sistem Electronic Procurement (e-Proc) yang dapat diakses pada laman Corporate Website BNI dan web: <https://e-proc.bni.co.id>. Rancangan sistem dan kebijakan e-Proc BNI bertujuan untuk mendukung strategi transformasi menjadi digital banking agar mampu menghadapi persaingan bisnis di industry perbankan yang semakin ketat dan semakin mengarah ke digitalisasi. Sistem e-Proc BNI menawarkan digitalisasi dalam proses pengadaan melalui modul-modul seperti Procurement Management, Vendor Management, dan Contract Management. Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik melalui e-Proc BNI diharapkan dapat mendukung kualitas penerapan pengelolaan proses pengadaan barang dan/atau jasa dalam kebutuhan perbankan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dan informasi

the monitoring and audit process, and meet the needs of real-time access to information and equal information for all Associates involved in the procurement process.

Since 2018, e-procurement has been implemented at the Head Office. The aim is to integrate the entire procurement process so that it can be monitored effectively

E. Flow of Procurement Process through Electronic Procurement (E-Proc) Application

The procurement process in BNI is conducted electronically based on the web/internet by utilizing communication and information technology facilities. By implementing this policy, all parties involved, including vendors / prospective partners, partners / prospective procurement participants, and procurement committees, can be connected online in one end-to-end platform starting from the partner registration process, procurement stage, compliance test, contract signing, to payment.

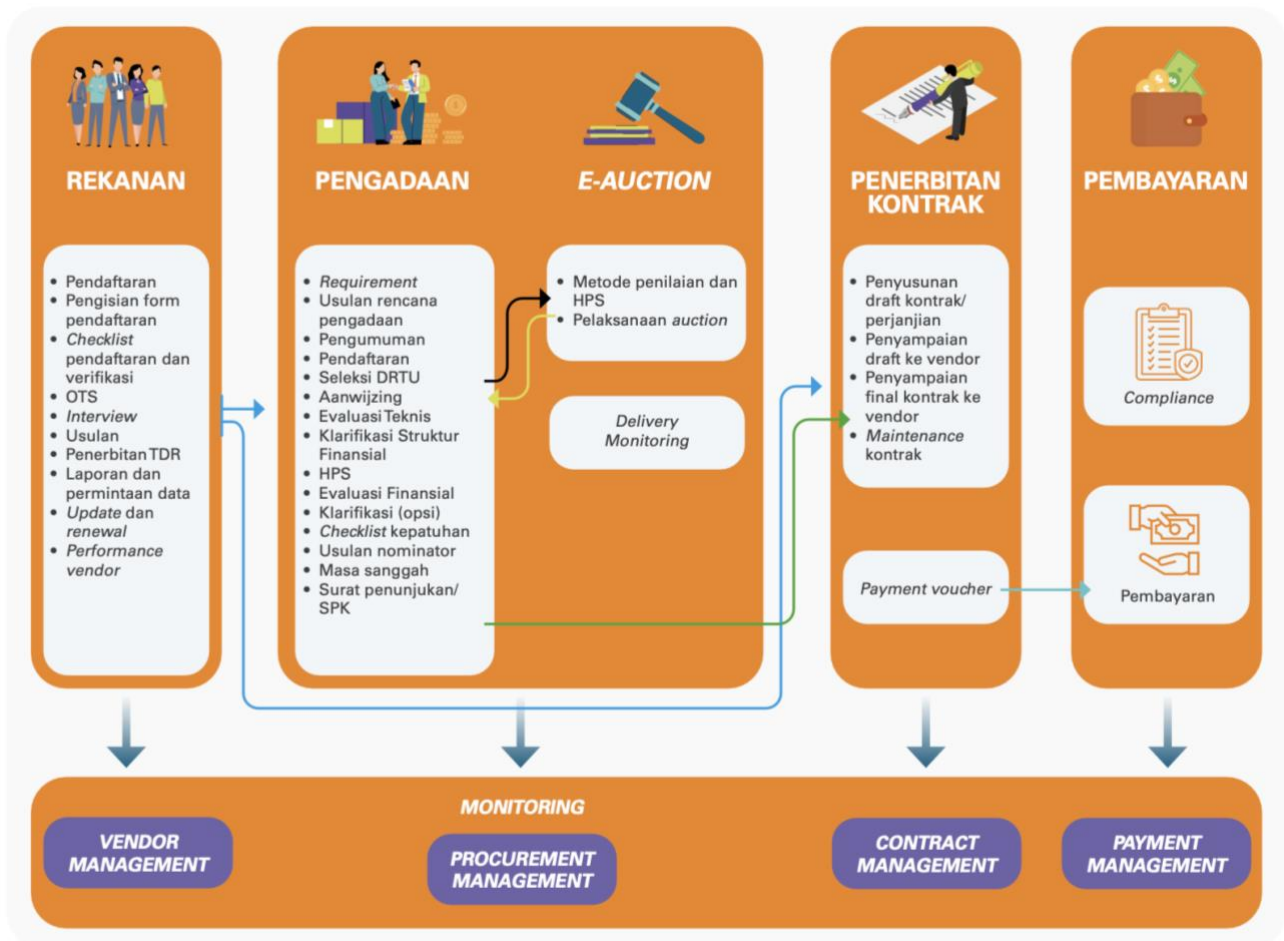
Electronic Procurement (e-Proc) system that can be accessed on BNI's Corporate Website and web: <https://e-proc.BNI.co.id>. The design of BNI's e-Proc system and policy aims to support the transformation strategy into digital banking in order to be able to face business competition in the banking industry, which is getting tighter and increasingly leading in digitalization. The e-Proc BNI system offers digitization in the procurement process through modules such as Procurement Management, Vendor Management, and Contract Management. The policy of electronic procurement of goods and/or services through e-Proc BNI is expected to support the quality of the implementation of the management of the procurement process of goods and/or services in banking needs that are transparent and accountable, improve the efficiency of the procurement process, support the monitoring and audit process, and meet the needs of real-time

yang setara untuk semua Rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan.

Sejak tahun 2018, e-Procurement telah diterapkan di Kantor Pusat, dan bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengadaan di Kantor Pusat agar dapat termonitor secara efektif.

access to information and equal information for all Partners involved in the procurement process.

Since 2018, e-procurement has been implemented at the Head Office. The aim is to integrate the entire procurement process at the Head Office so that it can be monitored effectively.



F. Sertifikasi terkait Pengelolaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Certification related to the Management of Procurement of Goods and/or Services

ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Dalam rangka meningkatkan integritas dan transparansi, BNI berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti-Penyuapan pada 11 Agustus 2020, khususnya dalam ruang lingkup Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Sertifikasi ini diperbarui pada 1 Januari 2024 dan akan berlaku selama tiga tahun, mencakup Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Segmen Kredit Korporasi, dan
--	---

	Dana Pensiun. BNI berkomitmen untuk menjalankan setiap aktivitasnya dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK sebagai dasar dari tata kelola perusahaan, mengikuti Prinsip 46, dan mematuhi Kode Etik BNI serta peraturan yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, BNI berusaha untuk: 1. Menjalankan perilaku jujur, tulus dan ikhlas serta disiplin, konsisten dan bertanggung jawab; 2. Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan Internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan; 3. Bersikap tegas terhadap segala bentuk penyuapan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 4. Berperan aktif dalam memastikan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di antaranya dengan melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan anti penyuapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 5. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan apabila terbukti melanggar kebijakan anti penyuapan. Dalam rangka memerangi praktik KKN dan suap, BNI menunjuk Divisi Kepatuhan sebagai fungsi independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Unit ini juga berwenang mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Agar kebijakan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak internal maupun eksternal, maka kegiatan sosialisasi kepada lingkungan BNI serta para pemangku kepentingan lainnya senantiasa menjadi hal yang krusial. <i>To improve integrity and transparency, BNI successfully achieved SNI ISO 37001:2016 certification for the Anti-Bribery Management System on August 11, 2020, specifically in the scope of Goods and/or Services Procurement. This certification was renewed on January 1, 2024, and will be valid for three years, covering Procurement Process, Corporate Credit Segment, and Pension Fund. BNI is committed to conducting each of its activities with the principles of accountability and responsibility, implementing the values of AKHLAK as the foundation of corporate governance, following Principle 46, and complying with the BNI Code of Ethics and applicable regulations.</i> <i>As a tangible manifestation of this commitment, BNI strives to:</i>
--	--

	1. <i>Practicing honest, sincere, and sincere behavior as well as discipline, consistency, and responsibility;</i> 2. <i>Implement laws and regulations and internal regulations related to the Anti-Bribery Management System in every action and decision-making;</i> 3. <i>Being firm against all forms of bribery to realize good corporate governance and free from all forms of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN);</i> 4. <i>Play an active role in ensuring the Implementation of the Anti-Bribery Management System, including by reporting suspected violations of anti-bribery policies by the applicable mechanisms at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;</i> 5. <i>Willing to accept the sanctions set by the company if proven to violate the anti-bribery policy.</i> <i>To combat corrupt practices and bribery, BNI appointed the Compliance Division as an independent function responsible for developing and overseeing the implementation of the Anti-Bribery Management System. This unit is also authorized to take strict action against violations that occur. For all internal and external parties to accept the Anti-Bribery Management System policy, socialization activities in BNI's environment and with other stakeholders are always crucial.</i>
ISO 9001:2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA BAGIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)	Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan standar internasional, BNI telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dalam bidang Sistem Manajemen Mutu untuk pengelolaan Harga Perkiraan Sendiri. Sertifikasi ini mencerminkan komitmen BNI dalam menjadi penyedia layanan yang andal bagi pelanggan, dengan menawarkan harga yang wajar dan tepat waktu, serta mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BNI juga terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan standar dan praktik internasional. <i>To improve the quality of its estimate price (HPS) management by international standards, BNI has successfully obtained ISO 9001:2015 certification in the field of Quality Management Systems for its estimate price management. This certification reflects BNI's commitment to being a reliable service provider for customers by offering reasonable and timely prices and complying with all applicable laws and regulations. BNI strives for continuous improvement to enhance service quality by international standards and practices.</i>

ISO 9001:2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA BAGIAN VENDOR MANAJEMEN	Komitmen BNI dalam meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen vendor sesuai dengan standar internasional dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu di bidang Vendor Management. Sertifikasi ini merupakan bukti nyata komitmen BNI dalam menyediakan layanan vendor yang andal dan profesional guna mendukung kelancaran proses pengadaan barang dan/atau jasa. Melalui sertifikasi ini, BNI tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam merekomendasikan vendor berkualitas yang sesuai dengan spesifikasinya, akan tetapi juga menegaskan bahwa proses pengelolaan vendor yang dilakukan telah memenuhi standar mutu global. Hal ini memberikan kepercayaan lebih bagi para mitra bisnis dan pelanggan BNI bahwa seluruh proses pengadaan dikelola dengan transparansi dan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, BNI juga secara konsisten melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan vendor management. BNI semakin memperkuat posisinya sebagai bank yang menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan vendor, memastikan bahwa seluruh pengadaan dilakukan sesuai standar dan praktik internasional demi mencapai keunggulan operasional yang berkelanjutan. <i>BNI's commitment to improving the quality of vendor management by international standards is proven through the ownership of ISO 9001:2015 certification for Quality Management Systems in Vendor Management. This certification clearly proves BNI's commitment to providing reliable and professional vendor services to support the smooth procurement process of goods and/or services. Through this certification, BNI demonstrates its ability to recommend quality vendors that meet its specifications and confirms that its vendor management process meets global quality standards. This gives BNI's business partners and customers more confidence that the procurement process is managed fairly and professionally.</i> <i>In addition, BNI consistently conducts continuous evaluations and improvements to enhance the quality of vendor management services.</i> <i>BNI has further strengthened its position as a best-practice bank in vendor management. To achieve sustainable operational excellence, all procurement is conducted in accordance with international standards and practices.</i>
---	---

-000-